

Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017

Dinasti politik, korupsi kepala daerah, dan pilkada memiliki relevansi satu sama lain. Disadari atau tidak, dinasti tumbuh subur melalui proses pemilu. Raja-raja kecil di daerah tersebut menguasai berbagai lini jabatan di daerah, baik sebagai kepala daerah dan legislatif.

Sekalipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, kritik tajam terhadap lahir dan langgengnya dinasti melalui pemilu yang demokratis layak ditujukan kepada partai politik. Sebab, partai politik adalah pemberi tiket pencalonan untuk pasangan calon kepala daerah maju dalam pilkada melalui jalur non independen.

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini telah muncul di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika kita mengenal dinasti Kennedy, Bush, dan Clinton. Jika dibandingkan dengan Indonesia, konteks dinasti Amerika lahir dalam mekanisme yang berbeda. Khususnya menyangkut peran partai politik dalam menentukan kandidasi.

Partai politik memegang peran besar dalam tumbuhnya dinasti politik, utamanya di daerah. Oligarki yang menjangkiti partai politik selama ini telah mengakibatkan cacatnya mekanisme kandidasi dan pencalonan kader partai untuk berkontestasi dalam pemilu. Dasar pencalonan tersebut menjadi tidak jelas, tidak terukur, dan tidak memprioritaskan kemampuan serta integritas bakal calon. Semua bergantung pada selera elit partai.

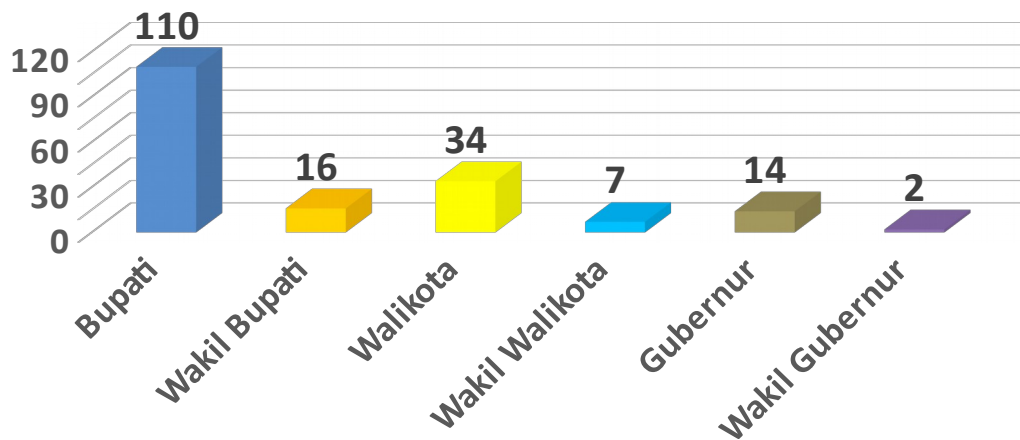
Pada saat yang sama, dinasti politik menguasai partai politik. Kelompok dinasti tersebut mengunci berbagai pos-pos penting dalam tubuh partai, baik pada level daerah maupun nasional. Alih-alih peran partai dapat diandalkan untuk memangkas dinasti politik, yang terjadi justru dinasti politik sudah terlebih dahulu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

Dengan persoalan diatas, dapat dikatakan bahwa fenomena dinasti politik sesungguhnya merupakan cerminan dari wajah partai politik di Indonesia. Sama halnya dengan fenomena bahwa berbagai kasus korupsi kepala daerah juga merupakan cerminan partai politik saat ini. Pada titik ini, jelas bahwa dinasti, korupsi, dan pilkada mempunyai keterikatan.

Selain partai politik, penyebab lain dari kemunculan dinasti politik adalah tidak adanya regulasi yang membatasi atau menekan potensi penguasaan politik oleh dinasti. Jika ditelaah kebelakang, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada telah membawa kemajuan besar dalam rangka membatasi dinasti dengan pendekatan larangan konflik kepentingan. Namun, Putusan MK yang membatalkan larangan konflik kepentingan dalam pasal 7 huruf r UU Pilkada tersebut. Hal ini turut membuka jalan para kelompok dinasti untuk turut berkontestasi dalam pilkada tanpa harus menunggu selama 5 tahun kedepan. Terbukti, fenomena yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 dan 2017 menunjukkan banyak dinasti maju dalam pilkada.

KORUPSI KEPALA DAERAH

Inventarisir *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atas penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2010-2015 menunjukkan tingginya angka keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi. Selama satu dekade tersebut, sedikitnya tercatat 183 kepala daerah, baik di level provinsi atau kabupaten/ kota menjadi tersangka kasus korupsi (ICW, 2015).



Keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi terus berlanjut pada 2016. Sepanjang 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 11 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kasus-kasus tersebut memiliki sebaran aktor dan pola yang berbeda. 11 kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (rincian terlampir):

Indikator	Tertinggi	Jumlah
Berdasarkan jabatan	Bupati	8 kasus
Berdasarkan jenis tindak pidana	suap	8 kasus
Berdasarkan sektor	Pengadaan dan pembahasan Anggaran	4 kasus pengadaan 4 kasus pembahasan anggaran
Berdasarkan partai	PDIP	4 orang

Data diatas menunjukkan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak dan memprihatinkan. Kepala daerah nyatanya sangat rentan melakukan korupsi. Bupati adalah kepala daerah yang paling banyak terlibat korupsi. Sementara itu, pengadaan dan pembahasan anggaran mendominasi sektor yang paling banyak dikorupsi oleh kepala daerah sepanjang 2016. Dilihat dari latar belakang partai pengusung, 4 dari 11 kepala daerah yang “ditangani” KPK berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

DINASTI POLITIK

Enam kepala daerah yang melakukan korupsi diketahui menerapkan atau berkaitan dengan dinasti politik di daerahnya. Fenomena ini semakin mengonfirmasi bahwa dinasti politik turut melanggengkan korupsi. Begitu pula dapat berlaku sebaliknya.

No.	Nama	Jabatan	Kasus
1	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2007-2017	Korupsi sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013.
			Suap sehubungan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2	Atty Suharti	Walikota Cimahi 2012-2017	Suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017
3	Sri Hartini	Bupati Klaten 2016-2021	Suap/ uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.
4	Yan Anton Ferdian	Bupati Banyuwangi 2013-2018	Suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
5	Syaukani Hasan Rais	Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010	Korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2003 s.d 2004
6	Fuad Amin	Bupati Bangkalan 2003-2012	Suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya.
			TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Fenomena politik dinasti dalam Pilkada Serentak yang akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang. Sebanyak 12 calon kepala daerah yang berkontestasi di 11 daerah diketahui berasal dari dinasti politik yang telah terbangun di daerahnya masing-masing. Berikut rinciannya:

Andika Hazrumy yang tengah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten 2017-2022 bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan terpidana kasus korupsi yang saat ini masih menjalani masa tahanan, yaitu

No.	Nama	Pilkada	Jabatan	Partai Pengusung	Keluarga	Jabatan	Hubungan
1	Andika Hazrumy	Provinsi Banten	Calon Wakil Gubernur	Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2012-2015	Orang Tua-Anak
2	Hana Hasanah Fadel	Provinsi Gorontalo	Calon Gubernur	PPP, Gerindra, PKB, PDIP	Fadel Muhammad	Gubernur Gorontalo 2001-2008	Suami-Istri
3	Dodi Reza Alex Noerdin	Kabupaten Musi Banyuasin	Calon Bupati	PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Hanura, PPP, PBB	Alex Noerdin	Bupati Musi Banyuasin 2002-2008	Orang Tua-Anak
4	Adam Ishak	Kabupaten Mesuji	Calon Wakil Bupati	PDIP, Hanura	(Alm) Ismail Ishak	Wakil Bupati Mesuji 2012-2016	Kakak-Adik
5	Parosil Mabsus	Kabupaten Lampung Barat	Calon Bupati	PDIP, PAN, Golkar	Mukhlis Basri	Bupati Lampung Barat 2007-sekarang	Kakak-Adik
6	Atty Suharti	Kota Cimahi	Calon Walikota	Nasdem, Golkar, PKS	Itoc Tochija	Walikota Cimahi 2002-2007	Suami-Istri
7	Siti Rahma	Kabupaten Pringsewu	Calon Bupati	PAN, Nasdem	Bachtiar Basri	Wakil Gubernur Lampung	Orang Tua-Anak
8	Dewanti Rumpoko	Kota Batu	Calon Walikota	PDIP	Eddy Rumpoko	Walikota Batu 2007-sekarang	Suami-Istri
9	Karolin Margret Natasa	Kabupaten Landak	Calon Bupati	PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, Gerindra, PAN	Kornelis	Gubernur Kalimantan Barat 2008-sekarang	Orang Tua-Anak
10	Noormiliyani A. S.	Kabupaten Barito Kuala	Calon Bupati	Golkar	Hassanudin Murad	Bupati Barito Kuala 2007-sekarang	Suami-Istri
11	Rahmadian Noor	Kabupaten Barito Kuala	Calon Wakil Bupati	Golkar	Hassanudin Murad	Bupati Barito Kuala 2007-sekarang	Keponakan
12	Tuasikal Abua	Kabupaten Maluku Tengah	Calon Bupati	Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, PDIP	Abdullah Tuasikal	Bupati Maluku Tengah 2002-2012	Kakak-Adik

Atut Chosiyah. Andika yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR RI 2014-2019 dicalonkan oleh DPD Partai Golkar Banten, dimana diketuai oleh Tatu Chasanah, adik kandung Atut Chosiyah.

Di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pasangan Noormiliyani dan Rahmadian Noor merupakan kerabat dari Hassanudin Murad, Bupati Barito Kuala yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat dua periode jabatan. Noormiliyani merupakan istri Hasanuddin Murad yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan. Sedangkan Rahmadian Noor merupakan keponakan Hasanuddin Murad yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Barito Kuala. Keduanya dicalonkan oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Atty Suharti petahana Calon Walikota Cimahi bahkan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus penerimaan suap sebesar Rp 500 juta terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Istri dari Walikota Cimahi periode 2002-2007 ini dicalonkan oleh Partai Nasdem, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Persoalan utama dari dinasti politik adalah penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan *check and balance* dalam pemerintahan. Terutama apabila dinasti telah mencengkeram eksekutif dan legislatif. Persoalan tersebutlah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi. Hal ini disebabkan karena:

1. Dinasti menguasai posisi politik, baik kepala daerah maupun DPR/D, yang membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dinasti politik menjadi bukti tidak terbantahkan. Terlebih lagi apabila dinasti juga menguasai birokrasi di daerah.
2. Dinasti politik membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya.

Dua hal di atas menjadi faktor yang memicu potensi korupsi yang lebih besar untuk dilakukan anggota dinasti politik

PILKADA SERENTAK 2017

Saat partai politik sudah dikuasai dinasti dan partai menjadi pragmatis dalam pencalonan, maka satu-satunya yang bisa dilakukan untuk memutus dinasti politik adalah peran pemilih (*voters*). Majunya 12 calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 menunjukkan rendahnya sensitivitas partai politik terhadap persoalan dinasti dan korupsi di daerah. Pada tahap ini, pemilih harus selektif dan cerdas dalam menentukan pilihannya dalam pilkada mendatang.

Pemilih harus melihat rekam jejak kandidat dan termasuk rekam jejak keluarga yang terafiliasi dengan kandidat. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah dinasti politik yang maju dalam pemilu memiliki persoalan atau potensi untuk melakukan kejahatan korupsi atau tidak.

Jika ada keluarga dari kelompok dinasti pernah atau sedang terlibat dengan kasus korupsi, maka sudah sepatutnya masyarakat untuk tidak memilihnya. Hal ini tidak hanya untuk menyelamatkan demokrasi, melainkan untuk kepentingan publik yang lebih luas agar persoalan korupsi di daerahnya tidak lagi terulang.

Selain itu, untuk meminimalisir dinasti politik pada pemilu-pemilu selanjutnya, pencalonan oleh partai politik seharusnya tidak berada di tangan ketua umum tetapi diputuskan melalui rapat pengurus anggota melalui mekanisme yang demokratis serta mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon.

Koalisi Pilkada Bersih

PUKAT UGM, PUSAKO UNAND, ICW, PERLUDEM, LINGKAR MADANI

Lampiran I

No	Nama	Jabatan	Perbuatan Pidana	Kasus	Sektor	Partai
1	Ojang Sohandi	Bupati Subang	Suap, gratifikasi dan TPPU	Suap sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014	suap Apgakum	PDIP
2	Suparman	Bupati Rokan Hulu	Suap	Menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015.	Pembahasan Anggaran	Golkar
3	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara	suap dan Penyalahgunaan wewenang	Pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014	SDA	PAN
4	Yan Anton Ferdian	Bupati Banyuasin	Suap	Suap dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan	Pengadaan	Golkar
5	Bambang Irianto	Walikota Madiun	Gratifikasi	Sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.	Pengadaan	Demokrat
6	Bambang Kurniawan	Bupati Tenggamas	Suap	Suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.	Pembahasan Anggaran	PDIP
7	Marthen Dira Tome	Bupati Sabu Raijua	penyalahgunaan wewenang	Korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS)	Anggaran	Nasdem
8	Samsu Umar Abdul Samiun	Bupati Buton	suap	Suap kepada Akil Muhktar dalam sengketa Pilkada Buton pada tahun 2012 sebesar Rp 1 Milyar	Sengketa Pilkada	PAN

9	Atty Suharti	Walikota Cimahi	suap	pemberian sebesar Rp 500 juta kepada Atty dan Itoc (suami) terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi	Pengadaan	
10	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang	korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009 dan gratifikasi sejak 2008	Pengadaan	PDIP
11	Sri Hartini	Bupati Klaten	Suap	suap dalam mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Klaten	Seleksi Pejabat	PDIP

Lampiran II

Dinasti dan Korupsi

No.	Dinasti	Daftar Dinasti	Jabatan	Hubungan Kekerabatan	Kasus
1	Ratu Atut - Banten	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2007-2017		Korupsi sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011-2013. Suap sehubungan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
		(Alm) Hikmat Tomet	Anggota DPR RI 2009-2014	Suami	-
		Ratu Tatu Chosiyah	Bupati Serang 2016-sekarang	Adik kandung	-
		Airin Rachmi Diany	Walikota Tangerang Selatan 2011-sekarang	Adik ipar	-
		Tubagus Haerul Jaman	Walikota Serang 2011-sekarang	Adik tiri	-
		Heryani	Wakil Bupati Pandeglang 2011-2016	Ibu tiri	-
		Andika Hazrumy	Anggota DPR RI 2014-2019/ Calon Wakil Gubernur Banten 2017-2022	Anak	-
		Ade Rossi Khoerunisa	Wakil Ketua DPRD Banten 2016-2019	Menantu	-
		Andiara Aprilia Hikmat	Anggota DPD 2014-2019	Anak	-
		Tanto Arban	Wakil Bupati Pandeglang	Menantu	-
		Aden Abdul Khalik	Anggota DPRD Banten periode 2009-2013	Adik tiri-ipar	-
2	Yasin Limpo - Sulawesi	Syahrul Yasin Limpo	Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018		-

Selatan					
	Nurhayati Yasin Limpo	Anggota DPR 2004-2009	Ibu	-	
	Ichsan Yasin Limpo	Bupati Gowa 2005-2015	Adik	-	
	Tenri Yasin Limpo	Anggota DPRD Sulsel/ Calon Bupati Gowa Pilkada 2015	Kakak	-	
	Adnan Purichta Limpo	Bupati Gowa 2016-2021	Keponakan	-	
	Irman Yasin Limpo	Plt. Bupati Luwu Timur 2015	Adik	-	
	Haris Yasin Limpo	Anggota DPRD Kota Makassar 2011	Adik	-	
	Dewi Yasin Limpo	Anggota DPR 2014-2019	Adik	Suap sehubungan Proyek di Sulawsi Selatan	
	Indira Chunda Thita Syahrul	Anggota DPR 2014-2019	Anak	-	
Andi Pahlevi	Anggota DPRD Kota Makassar 2014-2019	Kerabat	-		
3	Atty - Cimahi	Atty Suharti	Walikota Cimahi 2012- 2017	Istri	Suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017
		Itoch Tohija	Mantan Walikota Cimahi	Suami	-
4	Sri Hartini - Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten 2016-2021	Istri	Suap/ uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.
		Haryanto Wibowo	Bupati Klaten 2006-2016	Suami	-
		Andy Purnomo	Anggota DPRD Klaten 2014-2019	Anak	-
5	Yan Anton - Banyuasin	Yan Anton Ferdian	Bupati Banyuasin 2013- 2018	Anak	Suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
		Amiruddin Inoed	Bupati Banyuasin 2003- 2013	Bapak	-
6	Syaukani - Kutai Kartanegara	Syaukani Hasan Rais	Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010	Bapak	Korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2003 s.d 2004
		Rita Widayarsi	Bupati Kutai Kartanegara 2010-2021	Anak	-
7	Fuad Amin - Bangkalan	Fuad Amin	Bupati Bangkalan 2003- 2012	Bapak	Suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya. TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
		Makmun Ibnu Fuad	Bupati Bangkalan 2013- sekarang	Anak	-